

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan dan PKS di Jawa Tengah menjalankan pendidikan politik dalam dua dimensi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yakni pendidikan bagi kader dan anggota partai serta pendidikan bagi masyarakat luas, dengan bentuk yang berbeda secara mendasar akibat perbedaan orientasi ideologi masing-masing. Pada dimensi internal, PDI Perjuangan menyelenggarakan kaderisasi berjenjang tiga tingkat yaitu pratama, madya, dan utama, dilengkapi kaderisasi tematik bagi kepala daerah, anggota legislatif, serta kader muda melalui organisasi sayap partai, dengan materi utama berupa Pancasila, Marhaenisme, dan ajaran Bung Karno yang disampaikan secara partisipatif dan kontekstual. PKS menjalankan pembinaan kader melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA) setiap pekan dalam kelompok kecil dengan kurikulum terstandar yang mengintegrasikan nilai keislaman, kepemimpinan, dan wawasan politik, didukung sistem monitoring digital secara berkala. Pada dimensi eksternal, PDI Perjuangan menjangkau masyarakat melalui kegiatan sosial berbasis potensi lokal seperti urban farming, penyuluhan kebakaran, dan pemberdayaan ekonomi komunitas, serta seminar publik dan respons bencana. PKS menjangkau masyarakat melalui Training Orientasi Partai (TOP), program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang menyoar ibu rumah tangga di luar keanggotaan resmi, kegiatan seni dan budaya lokal, komunitas olahraga, serta respons aktif terhadap bencana.

Perbedaan bentuk program kedua partai ini mencerminkan perbedaan filosofi yang mendasar tentang bagaimana perubahan sosial-politik terjadi. PDI Perjuangan menempatkan ideologi sebagai pembeda identitas yang diwujudkan secara fleksibel dan kontekstual, sehingga pendidikan politiknya lebih inklusif dan mampu menjangkau masyarakat luas, meskipun rentan terhadap inkonsistensi kualitas antardaerah dan batas yang tipis antara pendidikan politik dan mobilisasi elektoral. PKS menempatkan ideologi Islam sebagai ruh yang menggerakkan seluruh pembinaan secara konsisten dan terstandar, menghasilkan kader dengan militansi ideologis tinggi yang mampu menjadi agen pendidikan politik mandiri di lingkungannya, namun dengan jangkauan eksternal yang lebih terbatas pada kelompok yang terhubung dengan jaringan partai. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa ideologi partai bukan sekadar identitas formal dalam anggaran dasar, melainkan benar-benar bekerja sebagai sistem nilai yang menentukan arah, metode, materi, sasaran, dan cara kedua partai mendekati masyarakat secara nyata di lapangan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, kedua partai belum sepenuhnya memenuhi tiga indikator keberhasilan pendidikan politik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yakni peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, peningkatan partisipasi politik, serta pembentukan kemandirian dan karakter bangsa. PDI Perjuangan menghadapi tantangan berupa kecenderungan pendidikan politik yang lebih terkonsentrasi pada kaderisasi internal, sementara pendidikan politik kepada masyarakat umum masih belum sepenuhnya terlembagakan dan kerap berisiko bergeser menjadi mobilisasi

dukungan. PKS menghadapi tantangan serupa, yaitu sistem pembinaan yang intensif dan terstruktur lebih banyak menasar kader dan anggota resmi, sehingga dampak kepada masyarakat yang lebih luas masih bergantung pada kemampuan difusi nilai melalui kader di lapangan. Keduanya berhadapan dengan hambatan struktural yang sama, yakni masalah sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, pragmatisme politik masyarakat yang diperparah praktik politik uang, serta ketimpangan indeks dana bantuan politik antardaerah yang membuat partai di Jawa Tengah harus melayani lebih banyak pemilih dengan dana per kapita yang jauh lebih kecil dibandingkan provinsi lain.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan akademis berupa analisis komparatif pendidikan politik antara partai dengan basis ideologi yang berbeda secara mendasar, yaitu nasionalis-kerakyatan dan Islam, dalam konteks pelaksanaan fungsi partai politik di Jawa Tengah yang selama ini belum banyak dikaji dalam literatur ilmu pemerintahan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ideologi menghasilkan model pendidikan politik yang saling melengkapi, di mana PDI Perjuangan unggul dalam jangkauan dan inklusivitas program kepada masyarakat, sementara PKS unggul dalam kedalaman pembinaan kader dan konsistensi ideologis. Namun keduanya masih menghadapi kesenjangan yang sama, yakni belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat sebagai sasaran eksternal yang merupakan bagian penting dari fungsi partai sebagaimana diamanatkan regulasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada masih terlalu minimalis dan administratif, tidak mengatur standar minimal bentuk, sasaran, maupun indikator keberhasilan pendidikan politik kepada masyarakat,

sehingga kualitas pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada komitmen masing-masing partai. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi kedua partai untuk memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat secara bersamaan, sekaligus mendorong perlunya reformasi regulasi yang lebih operasional agar penggunaan dana bantuan politik benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

1. Bagi PDI Perjuangan dan PKS

Berdasarkan temuan penelitian, saran ditujukan kepada kedua partai secara umum. PDI Perjuangan perlu memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat umum yang bersifat substantif, bukan sekadar kegiatan sosial, dengan menambahkan muatan seperti diskusi publik tentang hak warga negara dan mekanisme demokrasi, serta menjaga agar program tersebut tidak bergeser menjadi mobilisasi elektoral. PKS perlu membuka program pendidikan politiknya kepada masyarakat di luar keanggotaan resmi melalui forum atau kegiatan yang tidak mensyaratkan afiliasi partai. Secara bersama, kedua partai didorong menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat secara konsisten sepanjang tahun dan menggunakan dana bantuan politik sesuai peruntukannya.

2. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis operasional tentang bentuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat yang dapat dibiayai dana bantuan politik, disertai standar minimal yang dapat diverifikasi. Pemerintah juga perlu meninjau mekanisme distribusi dana bantuan politik antardaerah yang masih timpang agar seluruh partai memiliki kapasitas yang memadai. Adapun bagi KPU dan Bawaslu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Berperan aktif sebagai mitra partai dalam penyelenggaraan program pendidikan pemilih bersama di tingkat daerah.
2. Memastikan program pendidikan pemilih yang diselenggarakan bersifat netral, informatif, dan tidak berafiliasi pada kepentingan partai tertentu.
3. Mendorong kerja sama lintas partai dalam kegiatan pendidikan politik guna mengurangi polarisasi dan memperkuat kesadaran demokrasi kolektif di Jawa Tengah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengukuran dampak langsung pendidikan politik terhadap perubahan pengetahuan dan perilaku politik masyarakat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara khusus efektivitas program pendidikan politik kepada masyarakat (eksternal) yang dijalankan partai, dengan fokus pada sejauh mana program tersebut benar-benar meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri. Selain itu, penelitian dengan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan wawancara mendalam dengan survei kuantitatif kepada

masyarakat penerima program dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti.